



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : DIREKTORAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DADAN RUDIANSYAH**
2. Jabatan : **EXECUTIVE VICE PRESIDENT CORPORATE SECRETARY**
3. NHK : **91552**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.555.000.000

1. Tanah Seluas 305 m2 di TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/120 m2 di KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah Seluas 3412 m2 di KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/80 m2 di KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/120 m2 di KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 512.000.000

1. MOBIL, MITSUBISI PAJERO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOBIL, HONDA MINIBUS BRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 58.900.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 105.810.034**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 3.231.710.034



III. HUTANG

Rp. 952.113.710

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.279.596.324

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.